

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan “Deklarasi Bangkok”. Kerja sama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan sejahtera. Sejak didirikan pada tahun 1967, ASEAN telah bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Pada 8 Agustus 2017, ASEAN genap berumur 50 tahun dan di ulang tahun emasnya, berbagai capaian dan juga tantangan memperkuat ASEAN sebagai organisasi regional (Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, 2017).

Saat ini, ASEAN adalah salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan total gabungan Produk Domestik Bruto (PDB) sepuluh Negara Anggota ASEAN bernilai US\$ 3,0 triliun pada tahun 2018, yang menempatkan ASEAN sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia (ASEAN Secretariat, 2019). Hampir setengah dari total populasi ASEAN yang berjumlah lebih dari 640 juta

adalah perempuan. Perempuan berkembang sebagai pengusaha industri mikro dan kecil, yang merupakan tulang punggung ekonomi ASEAN. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyumbang antara 88,8% dan 99,9% dari total perusahaan dan antara 51,7% dan 97,2% dari total pekerjaan di Negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN Secretariat, 2018). Untuk itu, sangatlah penting agar hak-hak perempuan dapat terlindungi. Namun, dalam upaya untuk pemajuan dan perlindungan hak perempuan, ASEAN menghadapi berbagai tantangan diantaranya adalah kekerasan domestik dan seksual pada perempuan, dan juga eksploitasi pada perempuan dalam bentuk perdagangan manusia, perlakuan kejam, dan diskriminasi dalam migrasi. Undang-undang yang memadai dalam melindungi perempuan masih belum ada di banyak negara di kawasan ini. Misalnya, di Malaysia, perkosaan dalam perkawinan masih belum dianggap sebagai kejahatan. Sementara itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Asia Tenggara memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi.

Masalah pekerja migran di Negara-negara Anggota ASEAN juga merupakan isu yang harus segera diselesaikan. Dalam mencari peluang ekonomi, telah terjadi migrasi dari negara yang kurang sejahtera ke negara yang lebih sejahtera. Migrasi untuk bekerja di luar negeri telah menjadi tren regional. Singapura, Malaysia, Thailand telah menerima warga negara dari Indonesia, Filipina dan negara berkembang lainnya; yaitu Kamboja, Laos dan Myanmar. Kebanyakan dari pekerja migran tersebut adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Para pekerja migran tersebut mengalami berbagai masalah sosial, seperti perdagangan manusia, pelecehan,

kekerasan seksual, yang merusak klaim perempuan terhadap hak sosial dan ekonomi mereka (ASEAN Secretariat, 2016).

Namun, terdapat titik terang dalam menyelesaikan masalah pekerja migran di ASEAN. Pada tahun 2017, Negara-negara Anggota ASEAN menyepakati *ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers*, yang berkomitmen untuk mengimplementasikan tujuan dan komitmen yang terkandung di *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* yang diadopsi pada tahun 2007. Konsensus ini penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja migran yang bekerja di negara-negara ASEAN. Sejumlah hak pekerja migran yang telah diatur dalam konsensus ini, antara lain, berhak untuk mendapatkan kontrak kerja, menyimpan dokumen pribadi, termasuk paspor dan dokumen izin kerja, dan mendapatkan kesetaraan hukum. Selain mengatur mengenai sejumlah hak dasar dan hak khusus yang didapatkan oleh pekerja migran, Konsensus tersebut juga mengatur kewajiban negara pengirim (ASEAN Secretariat, 2018).

Menurut Sita Sumrit, Kepala Divisi Pengentasan Kemiskinan dan Jender dari Sekretariat ASEAN, saat ini terdapat tiga isu utama jender di masing-masing pilar ASEAN, yaitu (i) APSC: kepemimpinan politik; (ii) AEC: kesenjangan upah jender; dan (iii) ASCC: kekerasan terhadap perempuan (YSEALI, 2019). Dalam hal kepemimpinan politik, walaupun ada banyak perempuan yang memegang posisi kekuasaan di Asia Tenggara, perwakilan perempuan di pemerintahan sebagian besar negara Asia Tenggara masih kurang. Di Indonesia, meskipun undang-undang pemilu telah direvisi yang mewajibkan partai politik untuk memastikan bahwa 30

persen dari kandidat mereka adalah perempuan, perwakilan perempuan di badan legislatif tetap kurang, bahkan menurun dari pemilu tahun 2009 (17.86 persen) menjadi 17.36 persen di pemilu tahun 2014. Persentase yang lebih rendah terlihat di Thailand, Myanmar dan Malaysia masing-masing sekitar 11, 14 dan 15 persen (The ASEAN Post Team, 2018).

Di dunia perusahaan, berdasarkan *Women in Business Report 2020* oleh Grant Thornton International, persentase perempuan dalam manajemen senior naik dari 28 persen menjadi 35 persen di ASEAN. Wilayah ini berada di urutan ketiga dalam lima wilayah teratas dalam hal proporsi perempuan dalam manajemen senior setelah Afrika (38 persen) dan Eropa Timur dengan 35 persen (Grant Thornton International, 2020). Namun, perempuan di ASEAN masih mengalami diskriminasi dan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Menurut survei yang dilakukan oleh *Malaysia's Women's Aid Organisation (WAO)*, sekitar 40 persen wanita hamil didiskriminasi oleh atasan mereka. Ini termasuk menolak promosi mereka, menempatkan mereka dalam masa percobaan yang lama, menurunkan jabatan mereka, dan memecat mereka (The ASEAN Post Team, 2020).

Di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, budaya masih sangat dipengaruhi oleh struktur hierarkis dan patriarki. Dengan pola pikir kolektif ini, ada keyakinan bahwa pria harus memegang peran kepemimpinan karena mereka dianggap lebih kompeten. Pemikiran seperti ini menghambat ambisi perempuan Indonesia sendiri. CEO Sintesa Group Shinta Kamdani mengatakan bahwa 30 juta wanita Indonesia telah membuat keputusan untuk tidak menaiki tangga karier karena ada persepsi bahwa memiliki peran yang diperluas akan mengganggu

keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan rumah tangga (Khidhir, 2019).

Kesenjangan upah jender juga masih merupakan masalah besar di ASEAN. Dalam sebuah studi Bank Pembangunan Asia (ADB), ditemukan bahwa rata-rata, perempuan mendapatkan gaji 30 persen lebih rendah daripada rekan pria mereka. Di Malaysia, rata-rata karyawan laki-laki memiliki gaji rata-rata RM2.342 (US \$ 560) per bulan sementara perempuan menghasilkan RM2.227 (US \$ 530) menurut Laporan Survei Gaji & Upah Departemen Statistik (DOSM) pada tahun 2018. Sedangkan di Singapura, perempuan berpenghasilan enam persen lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan serupa (The ASEAN Post Team, 2020).

World Economic Forum (WEF) melaporkan bahwa salah satu alasan signifikan mengapa kesenjangan jender tetap besar adalah karena *care work* atau pekerjaan perawatan di sebagian besar negara hampir selalu jatuh pada perempuan. Industri perawatan dinilai rendah dan paling sering dibayar rendah. Di Malaysia, gaji bulanan minimum untuk satpam Nepal yang biasanya bekerja selama 12 jam sehari dilaporkan RM1.900 (US \$ 463). Padahal, pembantu rumah tangga Indonesia yang bekerja dengan jam kerja lebih lama hanya memperoleh RM900 (US \$ 219) sebulan. Meskipun banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mempersempit kesenjangan jender dalam hal upah akan memiliki dampak signifikan pada pendapatan negara, namun negara-negara ASEAN masih gagal untuk mengadopsi standar progresif yang menghormati perempuan sebagai kontributor yang setara untuk kinerja ekonomi serta kesejahteraan rumah tangga masing-masing (Louis, 2020).

Pembentukan Komunitas ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara-negara anggota dan kawasan. Proses pembentukan komunitas ASEAN telah secara konsisten mengupayakan kesetaraan jender, pemberdayaan perempuan dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan sebagai salah satu prinsip panduannya. Hal ini diartikulasikan dalam Visi Komunitas ASEAN 2025 dan ditegaskan kembali dalam *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025* atau Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025, yang memuat prioritas dan strategi untuk mencapai tujuan sosial budaya ASEAN. Visi Komunitas ASEAN 2025 memimpikan pembangunan komunitas inklusif yang mempromosikan kualitas hidup yang tinggi, akses yang adil terhadap peluang bagi semua dan mempromosikan dan melindungi hak asasi perempuan, anak-anak, orang tua/lanjut usia, penyandang cacat, pekerja migran dan rentan dan kelompok yang terpinggirkan. Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025 telah mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang berupaya, antara lain, mengurangi hambatan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan memastikan akses yang setara untuk semua (ASEAN Secretariat, 2015).

Namun terdapat keprihatinan, terutama oleh berbagai organisasi dan kelompok perempuan di ASEAN, bahwa kesetaraan jender hanya dipertimbangkan dalam Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN, dan telah ditinggalkan di dua pilar ASEAN lainnya (ASEAN Secretariat, 2016). Dalam arsitektur ASEAN saat ini, isu-isu jender dan perempuan berada dalam ruang lingkup pilar ASCC. Dalam

melakukan implementasi, koordinasi, dan pengawasan prioritas-prioritas kawasan ASEAN terkait isu-isu perempuan pada tingkat-tingkat yang bervariasi dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial, ASCC dibantu oleh ACW (*ASEAN Committee on Women* atau Komite ASEAN untuk Perempuan) yang didirikan pada tahun 1976. ACW melapor kepada AMMW (*ASEAN Ministerial Meeting on Women* atau Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Perempuan). AMMW menetapkan arah kebijakan strategis tentang kerja sama regional ASEAN tentang perempuan. AMMW berada di bawah Pilar ASCC. ACW mendukung AMMW dengan merekomendasikan kebijakan regional, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana kerja regional lima tahun, dan mengelola kemitraan (ASEAN Secretariat, n.d.).

Keenam area prioritas dari Rencana Kerja ACW 2016-2020 yang difinalisasi pada pertemuan ACW ke-15 yang berlangsung pada 6 Oktober 2016 di Singapura menekankan pada kepemimpinan perempuan, *non-gender stereotyping* dan perubahan norma sosial, pengarusutamaan jender di antara tiga pilar Masyarakat ASEAN, eliminasi kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan hak ekonomi perempuan, dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan pada situasi-situasi yang rentan (ASEAN Secretariat, 2016).

Pada saat yang sama, Rencana Kerja ACWC 2016-2020 juga disahkan pada pertemuan ACWC ke-13 pada 3-5 Oktober 2016 di Singapura. Program kerja lima tahun ini, terdiri dari 16 area tematik, diantaranya pengarusutamaan jender (tematik area ke-14) dan memperkuat hak ekonomi perempuan terkait feminisasi kemiskinan, hak perempuan atas tanah dan properti (tematik area ke-11) (ASEAN

Secretariat, 2018). ACWC (*ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* atau Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak) yang didirikan pada 2010 di Hanoi, Vietnam, mempunyai mandat dan fungsi yaitu pengembangan kebijakan, program, dan strategi inovatif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak untuk melengkapi pembangunan Masyarakat ASEAN (ASEAN Secretariat, 2010).

Dibandingkan dengan wilayah lain di dunia, ASEAN memang terlambat dalam mengadopsi instrumen kebijakan dan hukum terkait gender. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, badan-badan ASEAN telah lebih responsif gender dan telah mengembangkan sejumlah rencana kerja khusus untuk pemberdayaan perempuan dan promosi pengarusutamaan gender. Arah strategis regional yang diambil ASEAN menuju pemberdayaan perempuan dan anak perempuan juga dipandu oleh instrumen-instrumen regional berikut: (i) *Declaration on the Advancement of Women in the ASEAN Region* (1988); (ii) *Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region* (2004); (iii) *Ha Noi Declaration on the Enhancement of the Welfare and Development of ASEAN Women and Children* (2010); (iv) *Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children* (2013); (v) *ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Women* (2015); (vi) *ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Children* (2015); dan (vii) *ASEAN Declaration on the Gender-responsive Implementation of ASEAN*

Community Vision 2025 and the Sustainable Development Goals (2017) (ASEAN Secretariat, n.d.).

Sebuah studi yang dibuat tahun 2016, berjudul *Projected Gender Impact of the ASEAN Economic Community*¹, telah menyimpulkan bahwa kebijakan dan program di ASEAN perlu responsif jender jika perempuan dan laki-laki, dan ekonomi regional secara keseluruhan, akan mendapatkan manfaat penuh dari perdagangan dan ekspansi investasi, pengembangan dan transformasi ekonomi, dan integrasi yang adil dan inklusif. Secara khusus, di studi tahun 2016 yang sama telah menemukan hambatan signifikan terhadap kesetaraan jender di ASEAN, termasuk yang ada di pasar tenaga kerja, di antara ekonomi regional. Studi ini membuat sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki situasi ini. Sebagai langkah pertama, direkomendasikan bahwa pemantauan MEA pasca-2015 harus memasukkan indikator jender di berbagai bidang fokus dan topik di bawah MEA. Lebih penting lagi, penelitian ini menyerukan pengenalan dan promosi strategi pengarusutamaan jender dalam pilar AEC. Strategi tersebut harus ditentukan secara kolaboratif dan dirancang secara virtual dari awal oleh pemangku kepentingan publik dan swasta terkait (Jha & Saxena, 2016).

Menurut laporan "*The Power of Parity: Advancing Women's Equality in Asia Pacific*" yang dirilis pada April 2018 oleh McKinsey Global Institute,

¹ Studi ini dilakukan bersama oleh Sekretariat ASEAN, *UN Women Regional Office for Asia*, and the Pacific atau Kantor Regional Wanita PBB untuk Asia dan Pasifik dan Friedrich-Ebert-Stiftung, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Maret 2016 dengan cetak ulang pertama pada bulan Juni 2016. Di antara banyak pemangku kepentingan sektor publik dan swasta yang dikonsultasikan dalam persiapan penelitian ini adalah *ASEAN Committee on Women* atau Komite ASEAN untuk Perempuan dan *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* atau Komisi ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak.

ekonomi Asia Tenggara dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) kolektif mereka sebesar US\$ 370 miliar per tahun pada tahun 2025 jika ketidaksetaraan gender di wilayah ini dieliminasi. Jumlah ini mewakili sekitar sembilan persen peningkatan dari PDB. Ini dapat dihasilkan dengan meningkatkan rasio partisipasi tenaga kerja perempuan-ke-laki, meningkatkan jumlah jam kerja yang dibayar perempuan, dan mempekerjakan lebih banyak perempuan di sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi (McKinsey Global Institute, 2018).

Menurut laporan tersebut, perempuan di Asia Tenggara berkontribusi 36,4 persen dari PDB regional gabungan. Namun, persentase ini tidak menangkap total kesejahteraan dan kegiatan ekonomi perempuan di wilayah tersebut, yang juga mencakup nilai ekonomi yang sangat signifikan yang diciptakan perempuan melalui pekerjaan perawatan tanpa bayaran di rumah seperti merawat anak-anak dan orang tua, berbelanja, memasak, dan pembersihan. Dalam lingkungan kerja, sebagai suatu wilayah, Asia Tenggara mencatat tingkat ketidaksetaraan gender yang tinggi, dengan yang tertinggi tercatat di Malaysia dan terendah di Filipina. Namun, upaya untuk memajukan kesetaraan gender di lingkungan kerja tidak mungkin dicapai tanpa kemajuan kesetaraan gender di masyarakat (McKinsey Global Institute, 2018).

Maka, tidak mengherankan jika kurangnya kesetaraan gender telah diidentifikasi sebagai masalah yang perlu diselesaikan di ASEAN, di antara banyak kawasan dan negara lain di dunia. Visi Komunitas ASEAN 2025 dibuat untuk mewujudkan ASEAN yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, bertanggung jawab secara sosial, dan benar-benar berorientasi pada orang,

berpusat pada rakyat dan berdasarkan pada peraturan. Agar dapat mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan untuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana diartikulasikan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB 2030 yang telah diadopsi oleh semua negara anggota ASEAN, ASEAN perlu bekerja sama secara lintas sektoral diantara badan-badan sektoral di ketiga pilar ASEAN, bukan hanya di pilar ASCC.

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, isu gender dan perempuan bukan hanya merupakan isu sosial, namun juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu kawasan dan negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Kesetaraan gender dan pemberdayaan politik perempuan adalah elemen kunci untuk konsolidasi demokrasi berkelanjutan di seluruh dunia. Organisasi global dan regional memainkan peran penting dalam pengembangan kerangka hukum dan kebijakan, serta dalam desain rencana aksi yang efektif untuk lebih mendukung kemajuan agenda kesetaraan gender di tingkat global, regional dan nasional.

Oleh karena itu, kerjasama ASEAN memberikan konteks yang tepat dalam kerjasama regional, di mana ASEAN sebagai entitas regional tidak memiliki keberpihakan, dan terus bekerja sama dengan aktor negara dan non-negara di dalamnya, guna memenuhi target yang telah ditetapkan atau mengatasi masalah yang sedang dihadapi bersama. Kerjasama ASEAN dengan sektor swasta, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender.

Pada *Chairman's Statement* atau Pernyataan Ketua ASEAN di KTT ASEAN ke-30 di Manila pada tanggal 29 April 2017, para Pemimpin ASEAN menekankan perlunya meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di wilayah ini melalui kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta yang relevan, dengan tujuan untuk memastikan tidak ada diskriminasi pada akses perempuan ke peluang ekonomi dan sumber daya. Pernyataan Ketua ASEAN ini juga menyerukan penyelesaian tepat waktu dan implementasi strategi pengarusutamaan jender di ketiga pilar Komunitas ASEAN (ASEAN Secretariat, 2017).

Pengarusutamaan jender merupakan proses atau strategi untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan jender. Pengarusutamaan jender didefinisikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan atau dilaksanakan (seperti perundang-undangan, kebijakan dan program, dan peraturan) di bidang apa pun dan di semua tingkatan. Hal ini terdiri dari strategi dan tindakan untuk menjadikan aspirasi perempuan serta aspirasi dan perhatian laki-laki sebagai dimensi integral dalam pelingkupan, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi semua undang-undang, kebijakan, program, dan peraturan. Hal ini untuk memastikan bahwa manfaat perempuan dan laki-laki sebagian besar setara dan bahwa ketidaksetaraan atau kesenjangan berbasis jender diturunkan dan tidak diabadikan (United Nations. Economic and Social Council, 2002).

Tahun 2017 ini merupakan tahun dimana Filipina mendapat giliran menjadi ketua ASEAN di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. Tahun 2017 juga

menandai peringatan 50 tahun usia organisasi regional tersebut, sehingga ada simbolisme dan harapan tinggi yang melekat pada kepemimpinan Filipina. Yang dimaksudkan dengan kepemimpinan dalam penanganan isu jender disini adalah secara tradisi sudah kuat dalam kesetaraan jender, memiliki mekanisme nasional yang kuat untuk menangani isu jender dan mendapatkan pengakuan di level global sebagai salah satu negara yang memimpin dalam menutup kesenjangan jender, sehingga dianggap mampu mengadvokasikan isu jender tersebut di level regional.

Filipina sendiri memiliki reputasi yang mengesankan dalam hal kesetaraan jender. Menurut laporan *Global Gender Gap 2020* yang dirilis oleh WEF pada tahun 2019, Filipina berada di peringkat 16 dari 153 negara dengan skor 0.781. WEF mencatat bahwa Filipina telah menutup 78% dari seluruh kesenjangan jendernya, dan merupakan negara dengan kesetaraan jender terbaik di Asia dan telah memiliki reputasi itu sejak laporan itu diluncurkan pada tahun 2006.

Sebagaimana telah diketahui, di beberapa negara Asia Tenggara, upah murah perempuan adalah sumber keunggulan kompetitif perusahaan dan ketika sebuah negara memutuskan untuk menaikkan upah minimum, perusahaan-perusahaan tersebut berkemas dan pindah ke negara lain dengan memberikan standar upah lebih murah. Namun, Filipina berhasil mempersempit partisipasi ekonomi dan peluang kesenjangan jender karena peningkatan kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa dan pendapatan yang diperkirakan diperoleh perempuan.

Keberhasilan Filipina tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari pemerintah Filipina untuk mewujudkan kesetaraan jender di negaranya melalui kerangka hukum dan struktur lembaga yang mengatur kesetaraan jender dan

pemberdayaan perempuan. Filipina telah sejak lama mengangkat dan memimpin isu gender dan pemberdayaan perempuan di ASEAN melalui program-program dalam rencana kerja ACW, terutama dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Maka, kepemimpinan Filipina di ASEAN pada tahun tersebut merupakan kesempatan baginya untuk mendorong agenda ini maju di wilayah tersebut.

Menurut laporan McKinsey Global Institute tahun 2018, Filipina dapat menambah \$40 miliar per tahun ke PDB pada tahun 2025, atau 7 persen PDB jika memajukan kesetaraan perempuan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menyumbang 58 persen dari potensi PDB tambahan, dan 42 persen berasal dari perubahan dalam campuran sektor di mana perempuan bekerja (McKinsey Global Institute, 2018).

Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah penting untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Pemberdayaan ekonomi perempuan mencakup kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara setara di pasar yang ada; akses mereka ke dan kontrol atas sumber daya produktif, akses ke pekerjaan yang layak, kontrol atas waktu, kehidupan dan badan mereka sendiri; dan peningkatan suara, agensi dan partisipasi yang berarti dalam pengambilan keputusan ekonomi di semua tingkatan dari rumah tangga ke lembaga internasional (UN Secretary-General's High Level Panel on Women's Economic Empowerment, 2016).

Pada KTT ASEAN ke-31 di Manila pada bulan November 2017, para pemimpin ASEAN secara langsung membahas masalah pengarusutamaan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam MEA dengan menyetujui "*Action*

Agenda on Mainstreaming Women's Economic Empowerment (WEE) in ASEAN" dan "ASEAN Declaration on the Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development Goals", yang penyusunan dan negosiasinya dipimpin oleh Filipina (ASEAN Secretariat, 2017). Kedua dokumen ini menyerukan pengarusutamaan masalah jender di bawah MEA serta implementasi kebijakan yang lebih kuat untuk mempromosikan WEE.

Penelitian ini akan membahas upaya dan peran Filipina dalam mengangkat isu pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat ASEAN sejak Filipina menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2017 dan dorongan para Pemimpin ASEAN untuk mengimplementasikan strategi pengarusutamaan jender di ketiga pilar Komunitas ASEAN, khususnya dalam pilar MEA karena dianggap paling vital terhadap pengembangan kawasan. Untuk membahas dan menganalisa topik ini, penulis akan menggunakan teori Hubungan Internasional Neoliberalisme Institusionalisme dan Feminisme karena kedua teori ini dirasa mampu menjelaskan bagaimana kerjasama ASEAN dalam mempromosikan pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama ke berbagai badan sektoral dari tiga pilar ASEAN. Dalam membahas dan menganalisa topik ini, selain menggunakan kedua teori tersebut, penulis menggunakan juga konsep institusionalis dan pembangunan internasional. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Bab II.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah digambarkan di atas maka ada tiga pertanyaan yang muncul sebagai pertanyaan penelitian: (1) Mengapa Filipina

dianggap mampu memimpin pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat ASEAN? (2) Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN dibawah kepemimpinan Filipina untuk mengangkat kesadaran atas pentingnya isu pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan? dan (3) Apa saja hasil yang dapat dilihat dari upaya mempromosikan pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh Filipina di tingkat ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tulisan ini bermaksud untuk mengidentifikasikan perkembangan upaya bersama ASEAN dalam mengangkat kesadaran dan isu pengarusutamaan jender yang telah dilakukan sejak Filipina menjadi Ketua ASEAN tahun 2017 hingga sekarang. Tulisan ini akan mengupas diskusi dan rekomendasi dari serangkaian konferensi ASEAN yang diselenggarakan oleh Filipina yang menyangkut pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Tulisan ini juga akan mencoba menjawab mengapa Filipina yang mampumemimpin upaya pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat ASEAN berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini. Penulis juga akan mencoba mengidentifikasi hasil yang dapat dilihat dari upaya pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan di tingkat ASEAN sampai dengan saat penelitian ini selesai.

1.4 Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan diskusi hubungan internasional, khususnya mengenai pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memahami ASEAN sebagai organisasi regional yang terdiri dari kumpulan negara-negara berdaulat dalam upayanya untuk menghadapi tantangan ketidaksetaraan jender dengan menerapkan strategi pengarusutamaan jender di semua pilar Komunitas ASEAN dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Perlu ditekankan bahwa upaya tersebut masih *ongoing* atau sedang berlangsung, maka masih belum menunjukkan hasil yang konkrit. Maka dari itu, penulis mencoba mengupas langkah awal dari upaya ASEAN untuk mengatasi masalah pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut, yaitu dengan menunjukkan bagaimana ASEAN mengangkat pentingnya kesadaran dan isu pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam komunitas ASEAN. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman badan-badan sektoral di ketiga ASEAN pilar tentang pengarusutamaan jender dengan fokus untuk membangun kebijakan dan program yang lebih responsif jender di kawasan ini yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan jender dalam berbagai sektor di setiap negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk membantu memahami setiap pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian. Penjelasan dari

masing-masing pokok bahasan akan disusun dalam lima bab, yang terdiri dari urutan berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini peneliti memberikan pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka konsep dan sistematika dari penelitian ini. Dalam Pendahuluan digambarkan secara singkat apa saja upaya ASEAN dibawah kepemimpinan Filipina sejak tahun 2017 dalam mengangkat kesadaran dan isu pengarusutamaan jender dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan (WEE) di komunitas ASEAN, antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah diimplementasikan oleh ASEAN atas inisiatif Filipina dalam mencapai hal tersebut sejak tahun 2017.

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab ini menjelaskan kerangka berpikir dan literatur-literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini, melalui teori dan konsep yang telah dipelajari mengenai topik ini.

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian dan alat analisis yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengandalkan buku-buku teks, jurnal, dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis lainnya. Karena masalah yang diteliti ini merupakan masalah yang sedang berlangsung atau *ongoing*, maka penelitian ini juga akan menggunakan teknik pengamatan.

Bab IV. Pembahasan

Pada bab IV ini peneliti akan membagi menjadi beberapa sub bab yang menjadi variabel dependen dan independen dari penelitian ini.

Bab V. Kesimpulan & Saran

Pada bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan dari penelitian ini, sebagai hasil yang komprehensif dan mendalam dari apa yang telah peneliti dapat melalui penelitian ini. Juga memberikan saran dan rekomendasi yang mungkin diperlukan untuk upaya peningkatan atau perbaikan penelitian sejenis dimasa depan.

Bab I telah menjelaskan latar belakang masalah dan tiga pertanyaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis untuk mengetahui sejauh mana upaya ASEAN dibawah kepemimpinan Filipina telah mengangkat dan mungkin juga meningkatkan pentingnya kesadaran dan isu pengarusutamaan jender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam berbagai sektor di tiga pilar Komunitas ASEAN. Bab II juga akan membahas kerangka pemikiran yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian.